

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses perubahan akan lebih menyentuh masalah manusia jika rangsangan perubahan muncul dalam perasaan dan emosi. Kebutuhan terhadap perubahan perlu ditempatkan dalam hal yang paling utama. Semua pihak yang terkait dengan pendidikan harus memiliki pandangan yang konstruktif bagi perubahan yang diinginkan, bahkan melibatkan diri secara proaktif untuk mewujudkan dan menjaga jalannya perubahan pendidikan.

Setidaknya, fungsi struktur sebagai sarana perubahan diciptakan sangat penting dalam suatu lingkungan orang-orang yang dapat merasa gembira dan menjadi bagian dari proses perubahan. Partisipasi pribadi yang menekuni bidang pendidikan menjadi pelopor utama dari dalam dan yang menyebarkan gagasan baru keluar melalui peran sosial di masyarakat.<sup>1</sup>

Sekarang ini pemikir dan pengelola pendidikan Islam perlu bersikap proaktif dalam merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat kini dan masa yang akan datang dengan memasukkan ilmu-ilmu eksakta ke dalam setiap programnya sehingga dapat mengembangkan teknologi canggih. Semua ini perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan sistem pendidikan Islam secara komprehensif, menyeluruh dan esensial serta dikelola secara profesional, sehingga tidak tertinggal dengan pendidikan lainnya.

---

<sup>1</sup>Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan; Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 41-42.

Sebenarnya jika dilihat dari potensi yang ada, lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi para pengelola lembaga belum bisa memanfaatkan sumber-sumber kekuatan tersebut secara maksimal. Hal ini disadari karena belum berjalannya fungsi-fungsi manajerial dengan baik.

Jika diidentifikasi kekuatan dan potensi tersebut, pendidikan Islam memiliki akar budaya yang kuat. Pendidikan Islam lahir dan berkembang dalam masyarakat dan sudah menjadi milik masyarakat, baik pendidikan dalam bentuk pesantren maupun madrasah.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, perumusan berbagai gagasan ke depan harus diserahkan pada *stakeholders* sekolah. Kalau sekolah negeri, *stakeholdersnya* adalah pemerintah daerah, siswa dan orangtua siswa, guru dan tata usaha di sekolah yang bersangkutan. Kesepakatan-kesepakatan dari forum inilah yang harus menjadi acuan pengembangan ke depan, yang dapat mencerminkan gagasan-gagasan ideal serta pertimbangan-pertimbangan aturan, norma dan kenyataan praktis di lapangan.<sup>3</sup>

Hasil pekerjaan dapat dicapai dengan optimal, jika kepala sekolah tidak bekerja sendirian, artinya bekerja dengan pihak-pihak terkait yang dikoordinir oleh kepala sekolah. Untuk maksud inilah, kepala sekolah harus kerjasama dengan *stakeholders* sekolah seperti wakil kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/BP3,

---

<sup>2</sup>Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 6.

<sup>3</sup>Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 233-234.

tokoh-tokoh masyarakat, pengawas, aparat Dinas Pendidikan, alumni, unsur profesi dan pengusaha.<sup>4</sup>

Relasi individu dengan lingkungan sosialnya mempunyai arti penting tentang bagaimana mereka berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Relasinya bersifat kompleks dan menjadi berbagai sasaran disiplin ilmu, sehingga bisa diperoleh gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan sosialnya.<sup>5</sup>

Di era globalisasi ini, kerjasama merupakan bagian yang tidak boleh tidak dilakukan oleh semua lembaga, tidak terkecuali lembaga pendidikan pesantren. Pesantren yang telah mengakar kuat dalam tradisi kependidikan di tanah air dalam perjalanan waktu akan terus ditentang untuk senantiasa memerankan tanggungjawab sosial, budaya, pendidikan dan agama bagi masyarakat sekitarnya.<sup>6</sup>

Jaringan antar pesantren yang terjadi selama ini lebih bersifat informal kekeluargaan ketimbang formal kelembagaan. Hampir semua pesantren menjadikan hubungan darah sebagai pengikat informal jaringan lembaganya. Ke depan, pesantren seharusnya mampu membangun kerjasama kelembagaan dengan pesantren-pesantren lainnya secara lebih konkret demi menata dan menyempurnakan kekurangan yang ada, sehingga pesantren mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 364.

<sup>5</sup>Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, 1989), h. 65.

<sup>6</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 169.

<sup>7</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global, Ibid*, h. 169-171.

Hampir dipastikan bahwa jaringan (*network*) merupakan elemen penting dalam sebuah institusi atau lembaga untuk terus berkiprah. Di era globalisasi ini, hampir tidak ditemukan sebuah institusi atau lembaga yang mengabaikan aspek kerjasama, tidak terkecuali lembaga pendidikan pesantren. Bahkan kerjasama merupakan keharusan yang tidak boleh tidak untuk dilakukan. Tanpa adanya jaringan kerjasama yang kuat, maka kehadiran sebuah lembaga atau institusi semisal pesantren kurang begitu berlangsung efektif.<sup>8</sup>

Melihat keterlibatan peran masyarakat yang begitu besar dalam menentukan arah pendidikan, maka seyogyanyalah sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan proses pendidikan menggandeng serta melibatkan masyarakat (*stakeholders* pendidikan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan melalui hubungan kerjasama yang baik, harmonis dan saling menguntungkan.

Upaya mempertahankan kelangsungan lembaga pendidikan pesantren memerlukan pemikiran dan kerja keras. Pesantren dihadapkan pada dua masalah penting, yaitu pesantren dituntut bisa mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan agama dan benteng moral masyarakat. Di sisi lain, pesantren juga diharuskan mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat di sekelilingnya dengan merespon perkembangan zaman.

Peran pesantren pun melebar menjadi agen perubahan dan pembangun masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila sekarang pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan ingin pondok pesantren menjadi pusat pemberdayaan

---

<sup>8</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global, Ibid*, h. 168.

masyarakat. Fungsinya tidak hanya sebagai lembaga agama, melainkan juga menanggapi soal-soal kemasyarakatan yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>9</sup>

Tugas masyarakat pesantren tidaklah mengurangi arti tugas keagamaannya, karena peran tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai hidup keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat. Dengan tugas seperti ini pesantren akan menjadi milik bersama, didukung dan dipelihara oleh kalangan yang lebih luas serta akan berkesempatan melihat pelaksanaan nilai hidup keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Lembaga pendidikan pondok pesantren tentu sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena ia didirikan dan dibiayai oleh masyarakat. Pemerintah yang tidak dapat menyelenggarakan pendidikan secara keseluruhan membutuhkan peran masyarakat dengan memberi peluang untuk berpartisipasi dalam pendidikan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat sendiri.<sup>11</sup>

Hubungan lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah dan pondok pesantren dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan agar terbina dan berkembang pertumbuhan pribadi yang lebih baik bagi peserta didik di sekolah. Sekolah dalam hal ini dianggap sebagai sistem sosial yang merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat,

---

<sup>9</sup>Ali Romdhoni, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat*, Dialog; Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Vol. 37, No. 1, (2014), h. 99-100.

<sup>10</sup>Ali Romdhoni, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat*, *Ibid*, h. 101.

<sup>11</sup>HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 75.

dengan saling berhubungan erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Hubungan antara manusia inilah yang apabila didasari dengan keikhlasan bisa menjadi sebagai wahana untuk lebih mendekat dengan Rabb-nya. Kualitas hubungan antar manusia merupakan jalan pendorong atau penghambat bagi seseorang dalam menghadapi kehidupan ini, karena itu wajarlah apabila seseorang mengatakan bahwa dosa terhadap Allah Swt. mudah untuk dilebur dengan cara bertaubat karena Allah Maha Pemaaf, dan Maha Pengampun.

Pengelolaan hubungan sesama manusia telah dijelaskan dalam Al-quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua manusia dari satu keturunan, maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Allah juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong sesamanya, karena hanya ketaqwaan, kesalehan dan kesempurnaan jiwa yang membuat kelebihan seseorang atas yang lain.

Agama memainkan peranannya dalam memberikan landasan pergaulan masyarakat yang memperhatikan moralitas dan religiusitas. Tidak dapat dielakkan lagi, karena selain agama pada dasarnya mengajarkan kepada umatnya tentang cita-cita ideal dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Agama

---

<sup>12</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 82.

memainkan peranannya baik secara struktural maupun kultural terhadap karakteristik masyarakatnya.<sup>13</sup>

Membangun jaringan hubungan/kerjasama yang efektif dengan semua *stakeholders* sampai terjadi kolaborasi di dalam sekolah tersebut merupakan suatu harapan yang harus terus digalakkan.<sup>14</sup> Jalinan kerjasama akan berlangsung baik, manakala pimpinan lembaga pendidikan Islam proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengelola institusi yang menjadi tanggungjawabnya, karena aktivitas tersebut berkaitan langsung pada kelompok masa depan masyarakat.<sup>15</sup>

Sekolah yang mampu menjalin kerjasama dengan *stakeholders* akan bisa bertahan lama, bahkan bisa maju. Masyarakat pada umumnya dan *stakeholders* khususnya akan melibatkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan sekolah tersebut. Pada prinsipnya, menumbuhkan hubungan dengan *stakeholders* adalah untuk saling memberi dukungan.

Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung juga sangat menentukan betapa pentingnya hubungan yang dapat antara sekolah dan *stakeholders*. Komunikasi yang efektif harus dibangun di antara keduanya, baik secara akademik (misalnya tokoh masyarakat yang diikutsertakan mengajar, para pengusaha yang

---

<sup>13</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global, Ibid*, h. 116.

<sup>14</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajar-Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 131.

<sup>15</sup>Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Organisasi Pembelajar (Learning Organization)*, (Pontianak: Alfabeta, 2009), h. 72.

diikutsertakan dalam membantu sekolah), maupun non akademik (berperan sebagai fasilitator, pendamping, mitra kerja dan penyandang dana).

Fakta yang ditemukan bahwa lembaga pondok pesantren di Indonesia telah memberikan peran penting sebagai lembaga yang berfungsi menyebarkan agama Islam dan mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik (*tafakkuh fiddin*). Karena itu, haruslah dipahami bahwa pondok pesantren sebagai wahana pengkaderan ulama.

Perbaikan atau pengembangan untuk pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan (*empowerment*) pegawai dan kelompok kerjanya dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar. Eksistensi kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai modal utama dalam meraih mutu dan kepuasan *stakeholders* melalui proses perbaikan mutu secara berkesinambungan.<sup>16</sup>

Pesantren terus tumbuh dan berkembang didasari tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat dan generasi penerus.<sup>17</sup> Kelahiran pesantren baru selalu diawali dengan cerita “*perang nilai*” antara pesantren yang akan berdiri dan masyarakat sekitarnya yang diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren baru dapat diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dalam bidang kehidupan moral.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Jainuddin, *Manajemen Pendidikan dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, An-Nahdhah; Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Volume 7, No. 13, (2014), h. 90.

<sup>17</sup>Jainuddin, *Manajemen Pendidikan dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Ibid*, h. 142.

<sup>18</sup>Jainuddin, *Manajemen Pendidikan dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Ibid*, h. 143-144.



Pesantren Al-Falah Banjarbaru merupakan sebuah pesantren yang berangkat dari model pembelajaran tradisional menuju kepada bentuk atau sistem pembelajaran yang modern. Eksistensi Al-Falah sangat menentukan sekali, khususnya untuk di daerah sekitarnya. Para ustadz atau kiai sangat dominan berperan dalam mencerdaskan umat khususnya di pengajian-pengajian di langgar, mesjid, kantor, dan rumah-rumah sekitar daerah Landasan Ulin dan Banjarbaru. Tenaga administrasi kantor, administrasi tenaga guru dan petugas urusan dapat juga melibatkan warga sekitar.

Pondok pesantren Al-Falah telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah, dibina secara perlahan-lahan dan berkembang sesuai perkembangan serta kebutuhan masyarakat, bahkan telah memberikan warna dan corak yang khas dalam wajah masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Menurut perjalanan sejarah pesantren, lembaga ini dituntut untuk bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di luar negeri. Kerjasama luar negeri ini mutlak dilakukan guna menjadikan pesantren berkiprah tidak saja di tanah kelahirannya sendiri, tetapi juga dalam ranah internasional.

Wujud kerjasama itu bisa berbentuk “penyesuaian” status (*mu’adalah*) dari lembaga-lembaga kelimuan semisal Mesir, Saudi Arabia dan semacamnya. Juga bisa berbentuk kerjasama dalam pertukaran santri di berbagai lembaga pendidikan di luar negeri atau juga asistensi peningkatan mutu lembaga pendidikan pesantren.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 172-173.

Tentu saja dengan adanya prinsip-prinsip kerjasama yang harus dijunjung, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas akademik pesantren itu sendiri, bukan malah merendahkan martabat pesantren.<sup>20</sup>

Menyadari bahwa masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka kerjasama pada level kelembagaan merupakan keniscayaan. Kerjasama tersebut tidak hanya antar pesantren, melainkan juga dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, baik pada level regional, nasional maupun internasional.<sup>21</sup>

Selama memberi sumbangan positif bagi pengembangan kualitas akademik pesantren, maka kerjasama tersebut mutlak untuk terus dibina dan dikembangkan. Hanya dengan membangun kerjasama yang simbiotik-mutualistik inilah pesantren bisa turut ambil bagian peningkatan pendidikan tidak saja pada ranah regional dan nasional, melainkan juga pada ranah internasional.<sup>22</sup>

Manfaat kerjasama tersebut, di samping untuk melengkapi kekurangan yang ada, kerjasama kelembagaan pesantren ini juga bisa dijadikan alat ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren bersangkutan sehingga kian meningkatkan daya tawar lembaga maupun alumninya. Dengan demikian, pesantren maupun alumninya dapat diperhitungkan dalam percaturan global.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Direktorat Pekatontren, *Dinamika Pondok Pesantren Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 16-17.

<sup>21</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, *Ibid*, h. 168.

<sup>22</sup>Direktorat Pekatontren, *Dinamika Pondok Pesantren Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 172-173.

<sup>23</sup>Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, *Ibid*, h. 168.

Pondok pesantren Al-Falah memiliki kepengurusan yang sangat kuat dan lengkap dalam rangka pengembangan pondok pesantren dan memiliki badan usaha yang cukup baik. Juga, dalam rangka pengembangan ustadz dan santri, pondok ini telah menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti LIPIA Jakarta untuk pendalaman bahasa Arab, dengan beberapa perguruan tinggi terutama IAIN Antasari dan di Timur Tengah dengan mengirim para alumni. Setiap tahun antara 7-9 orang alumninya dikirim ke Timur Tengah.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang relasi dalam penyelenggaraan pendidikan antara pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru dengan *stakeholders*. Atas dasar pemikiran inilah, peneliti akan melakukan kajian yang berjudul “*Relasi Pondok Pesantren Al-Falah Puteri dengan Stakeholders*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Memperhatikan situasi dan kondisi di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian tentang relasi pondok pesantren Al-Falah Puteri dengan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru?

---

<sup>24</sup>Muhammad Yuseran, *Profil Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru*, Ta'zim; Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Volume I, No. 01, (2011), h. 95-96.

2. Bagaimana manajemen keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru?
3. Apa saja bentuk relasi yang dilakukan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru.
2. Mendiskripsikan manajemen *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru.
3. Mendiskripsikan bentuk-bentuk keterlibatan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis; hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam.

2. Aspek praktis; agar dapat mengelola pondok yang bermanfaat terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pada pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru yang berdampak pada sistem pendidikan dan pengajaran pada santri serta pendidikan keagamaan terhadap masyarakat sekitarnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memahami judul dari penelitian yang penulis lakukan dan agar tidak ada kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis terlebih dahulu memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian ini, yaitu:

#### **1. Relasi**

Relasi di sini diartikan sebagai orang-orang yang saling terhubung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga dipahami sebagai keterlibatan orang-orang dalam penyelenggaraan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan Islam, khususnya keterlibatan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren Al-Falah Puteri.

#### **2. Pondok Pesantren**

Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata, "*pondok*" dan "*pesantren*". Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa Indonesia. Akar kata pondok disinyalir berasal dari bahasa Arab, "*funduk*" yang berarti hotel atau asrama.<sup>25</sup> Menurut Manfred dalam Ziemek (1986), kata pesantren berasal dari kata "*santri*" yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.

---

<sup>25</sup>Hasbullah, *Kapita Selekta Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 40.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat di mana para santri menetap, di lingkungan pesantren, disebut dengan istilah pondok. Dari sinilah timbul istilah pondok pesantren.<sup>26</sup>

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam dimana para santri menetap dalam asrama (pondok) dengan seorang kiai, atau tuan guru sebagai tokoh utama dan mesjid sebagai pusat lembaga pendidikan dan pembelajaran untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam.

### 3. *Stakeholders*

Perkataan *stakeholders* pada awalnya digunakan dalam dunia usaha, terdiri atas dua kata; *stake* dan *holder*. *Stake* berarti *to give support to*; *holder* berarti pemegang. Jadi *stakeholders* pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan.

*Stakeholders* di sini adalah orang-orang yang ikut memberi dukungan terhadap kelangsungan pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru, baik *stakeholders* internal maupun *stakeholders* eksternal seperti orang-orang yang berada di lingkungan pondok pesantren sendiri, misalnya ketua yayasan, kepala pondok pesantren/mudhirah, kepala bidang humas serta kepala bidang lainnya,

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 1.

guru/asatidz/asatidzah, karyawan/staf, dan para santri, dan orang-orang yang berada di luar lingkungan pondok pesantren, seperti Depag dan Diknas, baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap program atau kegiatan yang dibuat secara bersama-sama yang berada dalam lingkungan pondok pesantren.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pernah di temukan oleh penulis, ada beberapa yang menjadikan tempat penelitian di lembaga pemerintahan dan pondok pesantren sebagai berikut.

1. Tesis yang dilakukan oleh Mukhlis (2014) berjudul “*Manajemen Eksternal Stakeholders dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Buntok Kabupaten Barito Selatan*”. Penelitian ini terfokus pada manajemen eksternal *stakeholders* yang meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelibatan eksternal *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di Mts Negeri Buntok Barito Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen eksternal *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di Mts Negeri Buntok Barito Selatan memiliki beberapa aspek: (a) Perencanaan, yaitu memiliki perencanaan yang realistis dan sistematis dalam melibatkan pihak eksternal *stakeholders*. (b) Pengorganisasian, yaitu mempunyai wadah pengorganisasian yang memungkinkan dalam melibatkan pihak eksternal *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan. (c) pelaksanaan, yaitu memiliki 2 langkah strategis yang digunakan untuk menggerakkan dan

mendorong pihak eksternal *stakeholders* agar bisa terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri Buntok, yaitu dengan pendekatan bahasa dan pendekatan mutu, dan (d) Pengawasan, yaitu selalu adanya upaya dari pihak MTs Negeri Buntok untuk melakukan umpan balik mengenai hasil evaluasi dan penilaian untuk perbaikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

2. Tesis yang dilakukan oleh Sabaruddin (2008), dengan judul penelitian *Strategi Program Layanan bagian Hubungan Masyarakat pada Kantor Walikota Lhokseumawe* (Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan) terfokus penelitiannya adalah mengenai program layanan kehumasan dan strategi kehumasan Kantor Walikota Lhokseumawe. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berbagai program layanan humas Kantor Walikota Lhokseumawe belum terlaksana dengan baik, di sebabkan kekurangan prasarana dan minimnya informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan humas, sedangkan program layanan yang berjalan hanya pada *media relations*.
3. Tesis yang dilakukan oleh H. Mazuki Rahman (2012) berjudul “*Implementasi Manajemen Humas Pada Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupatenn Murung Raya Kalimantan Tengah*”. Penelitian ini terfokus pada manajemen humas, manfaat humas terhadap peningkatan pengelolaan, peran, dan media-media humas yang ada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupatenn Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa agar dapat mengetahui



manajemen kehumasan, manfaatnya terhadap peningkatan pengelolaan, perannya terhadap masyarakat sekitar serta media-media humas yang diterapkan di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum, penelitian di atas sedikit menyentuh pada pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu tentang relasi pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru dengan *Stakeholders*. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui relasi pondok pesantren Al-Falah Puteri dengan *stakeholders* baik internal maupun eksternal yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari (a) Latar Belakang Masalah, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Definisi Operasional, (f) Penelitian Terdahulu, dan (g) Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Teoritik yang berisi pembahasan tentang (a) Konsep Relasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (b) Pondok Pesantren, (c) *Stakeholders* dalam Dunia Pendidikan, dan (d) Manajemen Pelibatan *Stakeholders* dalam Pendidikan Di Sekolah.

BAB III: Metode Penelitian, terdiri dari (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Data dan Sumber Data, (d) Prosedur Pengumpulan Data (e) Analisis Data (f) Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV: Paparan Data Penelitian: terdiri dari (a) Gambaran Lokasi Penelitian, (b) Relasi Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru dengan *Stakeholders* yang Membahas tentang Masyarakat yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Keterlibatan Masyarakat dalam Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, Bentuk-bentuk Relasi *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru, dan (c) Pembahasan, berupa Analisis SWOT.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari (a) Kesimpulan (b) Saran.